

Rendahnya Partisipasi Pemilahan Sampah Organik Masyarakat pada Pengelolaan Lubang Resapan Biopori di Kota Padang

Zahara Syahranti¹, Mira Hasti Hasmira^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: mirahasti@fis.unp.ac.id

Abstrak

Permasalahan lingkungan di Kota Padang semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah harian yang mencapai 750 ton, dengan 65% berupa sampah organik yang belum terkelola. Program *Padang Bagoro* bertema “Satu Rumah Satu Biopori” diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai solusi untuk mengurangi genangan air dan mengelola sampah organik melalui teknologi lubang biopori. Faktanya, banyak lubang biopori di Kota Padang tidak berfungsi karena rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan biopori di Kota Padang serta mengkaji keterlibatan masyarakat berdasarkan empat tahapan partisipasi Cohen dan Uphoff (1977): pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang, yang dipilih secara *purposive*. Adapun kriteria yang telah ditentukan meliputi masyarakat partisipan dan non-partisipan, perangkat RT/Camat, serta pegawai DLH. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif untuk menilai kondisi dan fungsi biopori pascapemasangan, wawancara mendalam untuk menggali kendala dalam partisipasi, serta studi dokumen terkait kebijakan dan implementasi program. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hanya terjadi pada tahap pelaksanaan dan tidak berlanjut pada tahap pemanfaatan maupun evaluasi. Faktor penyebab utamanya mencakup minimnya sosialisasi dan edukasi lingkungan, keterbatasan sarana biopori dan fasilitas pemilahan sampah, tiadanya pemilahan lanjutan sampah organik, serta tidak adanya evaluasi program. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan program lingkungan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh pemberdayaan dan rasa memiliki masyarakat terhadap program.

Kata Kunci: Lubang Biopori; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Sampah Organik; Padang Bagoro.

Abstract

Environmental problems in Padang City are increasingly complex due to the daily waste volume reaching 750 tons, with 65% being unmanaged organic waste. The Department of Environment initiated the Padang Bagoro Program "One House One Biopore" as a dual solution to reduce puddles and manage organic waste through biopore technology. In reality, however, many biopores in Padang City are dysfunctional due to low community participation. This study aims to analyze the factors causing low community participation in biopore management and to examine community involvement based on Cohen and Uphoff's (1977) four stages of participation: decision-making, implementation, benefit-sharing, and evaluation. The research used a qualitative approach with a descriptive case study method. The 25 informants were selected purposively, including participating and non-participating community members, RT/Sub-district apparatus, and DLH staff. Data collection involved non-participatory observation to assess the condition and function of the biopores post-installation, in-depth interviews to explore barriers to participation, and document study regarding program policy and implementation. Data was analyzed using the Miles and Huberman model which includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings indicate that community participation only occurred during the implementation phase and did not continue through the utilization or evaluation phases. The primary inhibiting factors include minimal environmental socialization and education, limited biopore facilities and waste sorting infrastructure, lack of follow-up organic waste processing, and the absence of program monitoring or evaluation. The conclusion emphasizes that the success of

environmental programs is determined not only by technical aspects but also by community empowerment and their sense of program ownership.

Keywords: Biopore Holes; Community Participation; Organic Waste Management; Padang Bagoro.

How to Cite: Syahrianti, Z. & Hasmira, M. H. (2025). Rendahnya Partisipasi Pemilahan Sampah Organik Masyarakat pada Pengelolaan Lubang Resapan Biopori di Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 8(4), 543-555.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2025 by author.

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan di Indonesia semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah timbulan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan sampah nasional mencapai sekitar 31,9 juta ton per tahun yang berasal dari 290 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 63,3% atau sekitar 20,5 juta ton yang berhasil terkelola, sementara 35,67% atau sekitar 11,3 juta ton tidak tertangani dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya kapasitas pengelolaan sampah, baik dari segi infrastruktur, kebijakan, maupun partisipasi masyarakat. Pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis *ekonomi sirkular*, di mana sampah tidak hanya dianggap beban, tetapi juga potensi sumber daya ekonomi yang dapat diolah menjadi energi dan bahan baku alternatif (Widyastuti, 2025).

Salah satu bentuk penerapan prinsip ekonomi sirkular dapat dilihat melalui program *cofiring* biomassa di PLTU Surabaya, Cilegon, yang memanfaatkan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) hasil olahan sampah untuk menggantikan sebagian batubara. Program ini terbukti mampu mengurangi timbulan sampah hingga 30 ton per hari, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, serta mendukung transisi menuju energi terbarukan. Inovasi seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang terintegrasi dan kolaboratif tidak hanya berdampak pada pengurangan beban lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial (Kuncara et al., 2024). Implementasi inovasi tersebut masih terbatas dan belum merata, termasuk di Kota Padang yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Riska & Mubarak, 2025).

Rata-rata timbulan sampah di Kota Padang mencapai 750 ton/perhari dengan 668 ton di antaranya sudah terkelola. Sekitar 540 ton masih masuk ke TPA Air Dingin setiap hari, dan 65%-nya merupakan sampah organik sekitar 340 ton sampah per hari yang belum terolah, sementara sisanya berakhir di TPST tanpa proses pengolahan yang optimal (Mimbarsumbar, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Padang masih terfokus pada tahap akhir (pembuangan), bukan pada upaya pencegahan dan pengurangan dari sumbernya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang menilai perlunya percepatan peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui penguatan peran aktif masyarakat dan lembaga pengelola dalam menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R). Upaya ini diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat dari sekadar membuang menjadi memilah dan mengolah sampah secara mandiri (Hidayatullahi, 2024).

Program pengelolaan lingkungan di Kota Padang semakin diperkuat melalui *Padang Bagoro*, yaitu kegiatan gotong royong lintas kecamatan yang secara rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang bersama masyarakat. Program ini dimulai pada tahun 2023 yang diikuti oleh ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Padang tetapi pada awal tahun 2024 Hendri Septa selaku Wali Kota Padang saat itu mengusulkan bahwa Padang Bagoro dapat dilakukan oleh masyarakat yang dimulai dari keluarga, maksud dari program Padang Bagoro adalah menggerakkan seluruh keluarga, anak, bapak ibu, semuanya, bergerak membersihkan rumahnya masing-masing (Ril, 2024). Pada bulan November 2024 Padang Bagoro mengusung tema khusus "Satu Rumah Satu Biopori", sebagai tindak lanjut dari meningkatnya genangan air di berbagai wilayah serta tingginya proporsi sampah organik di Kota Padang. Pemerintah mengarahkan seluruh kelurahan untuk membuat dan memasang lubang biopori secara serentak sebagai upaya pengurangan sampah organik dan peningkatan infiltrasi air hujan. Melalui pendekatan kolaboratif antara DLH, kelurahan, dan masyarakat, biopori ditetapkan sebagai teknologi sederhana yang diharapkan mampu memperbaiki perilaku pemilahan sampah dan memperkuat kapasitas resapan air tanah (Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2024).

Permasalahan semakin nyata ketika dilihat dari jenis sampah yang dihasilkan. Dari total volume tersebut, sekitar 65% merupakan sampah organik yang belum terkelola dengan baik (Mimbarsumbar, 2025). Untuk menanggulangi hal ini, DLH menggagas Program Padang Bagoro dengan tema “Satu Rumah Satu Biopori” sebagai salah satu strategi pengurangan sampah organik dan peningkatan daya resapan air tanah (Diskominfo, 2024). Melalui teknologi lubang resapan biopori atau yang lebih dikenal dengan lubang biopori, masyarakat diharapkan dapat mengelola sampah organik rumah tangga menjadi kompos sekaligus mengurangi risiko genangan air. Berdasarkan hasil pengamatan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lubang biopori masih rendah. Hal ini terlihat dari kondisi lubang biopori di lima kecamatan: Kecamatan Koto Tengah, Padang Selatan, dan Padang Utara, Nanggalo, dan Lubuk Begalung. Di Kecamatan Koto Tengah dan Padang Utara, rata-rata lubang biopori dibiarkan kosong tanpa pengisian sampah organik sehingga tidak berfungsi. Sementara itu, di Padang Selatan dan Nanggalo, lubang biopori hanya diisi sampah dapur satu kali dan kemudian tidak dimanfaatkan lagi, menunjukkan ketidaktahuan masyarakat mengenai pengelolaan lanjutan. Kondisi di Lubuk Begalung serupa, di mana lubang biopori tidak digunakan karena dalam keadaan tertutup. Realita ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami prosedur penggunaan biopori serta manfaatnya dalam pengelolaan sampah organik.

Kegagalan pelaksanaan program *Padang Bagoro* tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga karena lemahnya partisipasi masyarakat pada setiap tahapan partisipasi sebagaimana dijelaskan oleh Cohen dan Uphoff dalam (Safitri et al., 2022), yaitu tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Minimnya sosialisasi dari pihak DLH, rendahnya keterampilan teknis warga dalam membuat lubang biopori, serta tidak adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan menyebabkan masyarakat tidak merasa memiliki program tersebut. Akibatnya, lubang biopori yang dibuat secara massal pada awal program tidak dirawat dan akhirnya kehilangan fungsinya. Menurut Rahmanita (2020), keberhasilan suatu program sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan tersebut, partisipasi tidak hanya berarti kehadiran fisik, tetapi juga keterlibatan mental dan emosional masyarakat dalam memahami manfaat program. Sementara Dwiningrum dalam Aswasulasikin (2017) dan Astuti dalam Sari (2024) menjelaskan bahwa partisipasi erat kaitannya dengan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang dilakukan bersama. Sejalan dengan itu partisipasi yang keterlibatan mental dan emosi lebih banyak dari pada fisiknya lebih dikenal dengan partisipasi suka rela, sedangkan partisipasi yang dipaksakan dikenal dengan mobilitas (Anggitirani, 2020).

Penelitian terkait pengelolaan lubang biopori atau tentang pengelolaan sampah sudah pernah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Subroto et al. (2024) serta Hutabarat & Simanjuntak (2022) menekankan efektivitas teknis biopori yaitu kemampuan penyerapan air, variasi diameter lubang, dan kontribusinya dalam mengurangi genangan di wilayah perkotaan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tijani, et al. (2024) fokus pada implementasi biopori sebagai strategi pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan, yang terbukti mampu meningkatkan pemahaman lingkungan dan mendorong partisipasi komunitas. Selanjutnya, penelitian Evangelion et al. (2025) menunjukkan bahwa edukasi biopori dapat meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat, tetapi tidak menghasilkan perubahan signifikan terhadap pengetahuan berdasarkan uji statistik. Sementara itu, penelitian Evania (2024) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah organik melalui teknologi BSF sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan.

Meskipun sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai lubang biopori dan pengelolaan sampah, namun sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor rendahnya partisipasi masyarakat pada pengelolaan lubang biopori. Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan berbagai studi terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada aspek teknis maupun edukatif dalam penerapan lubang resapan biopori. Nilai kebaruannya terletak pada analisis sosiologis tentang rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan teori Cohen dan Uphoff, yang diterapkan dalam konteks program pemerintah Kota Padang yaitu Padang Bagoro. Pendekatan ini menyoroti keterkaitan antara pengetahuan, sosialisasi, dan *sense of ownership* (Rahmanita, 2020). Masyarakat terhadap keberlanjutan pengelolaan sampah organik berbasis lubang biopori, sesuatu yang belum banyak dikaji secara mendalam sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah organik melalui pengelolaan lubang resapan biopori di Kota Padang, serta mengkaji tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan partisipasi berdasarkan teori Cohen dan Uphoff yang meliputi tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Kajian ini berangkat dari permasalahan rendahnya efektivitas program lingkungan berbasis masyarakat, khususnya *Padang Bagoro*, yang diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan sampah organik namun belum mencapai hasil yang optimal. Hasil penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan dalam meningkatkan efektivitas program biopori di masa mendatang.

Melalui hasil temuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat merancang strategi pemberdayaan dan sosialisasi yang lebih partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pelaksanaan program, tetapi juga subjek yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sampah organik yang mandiri. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif (Arifin, 1996). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengamatan terhadap perilaku, pengalaman, dan pandangan masyarakat terhadap program lubang biopori di Kota Padang. Jenis penelitian studi kasus deskriptif digunakan karena berfokus pada satu kasus tertentu, yaitu pelaksanaan program Padang Bagoro dengan tema “1 Rumah 1 Lubang Biopori” di lima kecamatan di Kota Padang. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 4 bulan di 5 kecamatan Kota Padang yaitu Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Nanggalo. Pemilihan informan dibuat menggunakan teknik *purposive* (Sugiyono, 2022) dengan beberapa kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan jumlah informan 25 orang. Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu masyarakat partisipan pemasangan biopori 13 orang, masyarakat non-partisipan (tinggal di sekitar lokasi) 6 orang, tokoh masyarakat dan aparat wilayah (termasuk RT, Kasi Tantrib, dan Plt Camat Padang Selatan) 5 orang serta, perwakilan Bagian Komunikasi Lingkungan DLH Kota Padang 1 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama. Pertama, observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Observasi non-partisipatif, dengan mengamati langsung terhadap kondisi lubang biopori dan perilaku masyarakat di sekitar lokasi penelitian tanpa terlibat langsung dalam kegiatan. Kemudian wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi-terstruktur kepada 25 informan yang dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan hambatan yang dirasakan masyarakat terkait pengelolaan lubang biopori. Serta studi dokumen digunakan untuk melengkapi informasi melalui dokumen kebijakan, foto kegiatan, serta data yang diunggah oleh instansi terkait di media sosial (Sugiyono, 2022).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1984) yang terdiri atas empat tahapan: (1) pengumpulan data melalui sumber primer dan sekunder, (2) reduksi data dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan informasi yang relevan, (3) penyajian data melalui pengorganisasian data tereduksi, serta (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian Miles (1984). Kredibilitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik (Abdussamad, 2021). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan temuan mengenai rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lubang biopori di Kota Padang.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Rendahnya Partisipasi Pemilahan Sampah Organik Masyarakat pada Pengelolaan Lubang Resapan Biopori di Kota Padang, terdapat 4 faktor mengapa partisipasi masyarakat masih rendah mengenai pemilahan sampah organik pada pengelolaan lubang resapan biopori atau lubang biopori di Kota Padang yaitu:

Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Lingkungan

Minimnya informasi terkait pengelolaan sampah organik menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lubang biopori juga rendah. Sosialisasi adalah proses belajar-mengajar atau pembentukan nilai, kebiasaan, dan aturan dalam berperilaku di masyarakat (Alim, 2019). Hal ini akan berdampak pada partisipasi masyarakat tentang pengisian sampah organik ke dalam lubang biopori sedangkan, penggunaan sampah organik sangat penting agar fungsi lubang biopori dapat berjalan secara optimal. Observasi lapangan lebih lanjut memperlihatkan bahwa sebagian besar warga masih membuang sampah organik bersama sampah anorganik tanpa melakukan pemilahan dari sumbernya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Bayu (45 tahun), selaku ketua RT di Perumahan Jihad Indah Persada Duo. Sebagai berikut:

“.....kalau untuk sampah organik istri saya biasanya langsung buang aja gada di pilah-pilah dan dimasukan ke lubang biopori. dan untuk pengelolaan sampah organik disini belum dilakukan sosialisasi jadi memang biasanya masyarakat disini buang sampah ya langsung aja

dimasukin ke kantong plastik lalu dikasih ke petugas LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah)". (Wawancara pada 16 Juni 2025).

Pernyataan dari Bapak Bayu (45 tahun), selaku ketua RT di Perumahan Jihad Indah Persada Duo, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilahan sampah dirinya masih belum melaksanakannya karena memang belum ada dilaksanakan sosialisasi secara langsung mengenai bagaimana cara memilah dan memanfaatkan sampah organik dari dapur untuk pengelolaan lubang biopori. banyak keraguan yang dirasakan dari pemanfaatan sampah organik pada pengelolaan lubang biopori yang ada di lingkungan sekitarnya. Pernyataan serupa disampaikan oleh bapak ridwan (55 tahun), selaku masyarakat yang ikut serta dalam pemasangan lubang biopori di perumahan jihad indah persada duo, pernyataan tersebut berupa:

".... Pihak DLH juga datang untuk sosialisasi lubang biopori, tetapi penjelasannya hanya kegunaan biopori untuk mengurangi genangan terus bisa diisi sampah organik yang akan jadi kompos. Jadi saya ga tau lebih lanjut tentang komposnya seperti waktu-waktu untuk mengambil komposnya...." (Wawancara pada 16 Juni 2025).

Ungkapan dari Bapak Ridwan (55 tahun) selaku masyarakat yang ikut serta dalam pemasangan lubang biopori di perumahan jihad indah persada duo, menjelaskan bahwa dalam hal sosialisasi mengenai lubang biopori ada dilaksanakan oleh pemerintah tetapi dalam pemilahan sampah belum ada dilakukan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemilahan sampah organik yang dapat digunakan dalam keberhasilan pemanfaatan lubang biopori di kota padang. Faktor minimnya sosialisasi merujuk pada peran pemerintah yang kurang maksimal, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada masyarakat tentang pentingnya lubang resapan biopori untuk mengurangi genangan, cara-cara pengelolaan sampah organik dan perawatan lubang biopori.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dua informan, Bapak Supra (42 tahun), Ketua RT di Kecamatan Padang Utara, dan Ibu Arini (40 tahun) masyarakat Kecamatan Nanggalo. Keduanya mengungkapkan kebingungan mengenai cara pemilahan sampah organik yang sesuai untuk lubang biopori. Bapak Supra dan Ibu Arini beranggapan bahwa memasukkan sampah ke dalam lubang biopori justru dapat menyebabkan penyumbatan. Persepsi inilah yang menjadi alasan utama mereka tidak memasukkan sampah organik ke dalam lubang biopori. Lebih lanjut, mereka juga menjelaskan bahwa tidak adanya kebiasaan pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga sejak awal membuat semua jenis sampah dibuang secara bersamaan untuk kemudian diangkut oleh Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) setempat.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi pemilahan sampah yang belum optimal menjadi akar masalah. Minimnya edukasi ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah, sehingga mereka menganggap kegiatan tersebut tidak memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Kondisi ini secara spesifik juga memengaruhi pengelolaan lubang biopori, di mana kurangnya pengetahuan tentang pemilahan sampah organik berujung pada rendahnya partisipasi masyarakat Kota Padang dalam memanfaatkan biopori secara berkelanjutan.

Akibatnya, potensi pengurangan sampah organik, pengolahan menjadi kompos, dan pengelolaan lubang biopori sebagai sistem resapan air menjadi tidak optimal. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan selama ini belum cukup efektif dalam membentuk perilaku pro-lingkungan yang berkelanjutan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Seperti temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Riska & Mubarak, 2025) memaparkan bahwa meskipun sebagian warga di Kota Padang telah mengetahui bahwa sampah sebaiknya dipilah dari sumbernya berdasarkan jenis sampah anorganik dan organik, pemahaman mengenai cara memilah yang benar serta konsistensi dalam pelaksanaan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih sangat terbatas. Pengetahuan dasar masyarakat terkait pemilahan sampah biasanya diperoleh dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DLH Kota Padang melalui kelurahan.





Gambar 1. Kondisi Lubang Biopori

Sumber: Domentasi peneliti

Berdasarkan gambar di atas terdapat 4 kondisi lubang biopori yang tidak sesuai dengan penggunaan lubang biopori yang baik. Pada gambar pertama disebelah kiri lubang biopori tidak memiliki penutup seperti gambar yang lainnya yang mana fungsi penutup pada lubang biopori adalah untuk mencegah sampah organik tersecer keluar dan memastikan air masuk kedalam tanah (Defitri, 2023). Selanjutnya pada gambar kedua di sebelah kanan menunjukkan bahwa keadaan lubang yang terlalu dalam sehingga menyulitkan untuk membuka tutupnya ketika ingin memasukan sampah kedalam lubang. Untuk gambar di sebelah kiri bawah menampilkan keadaan lubang biopori yang sudah pecah yang dibiarkan begitu saja, gambar yang terakhir menunjukkan posisi lubang biopori yang terlalu tinggi dari permukaan tanah yang seharusnya lubang biopori sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2013). Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa keterbatasan sosialisasi yang dilakukan masih belum menjangkau seluruh masyarakat karena beberapa kondisi lubang biopori yang kurang tepat. Kondisi lubang tersebut menandakan bahwa minimnya sosialisasi yang dilakukan dan edukasi lingkungan yang diterima masyarakat sehingga pengelolaan lubang biopori masih belum tepat digunakan.

Keterbatasan Sarana Lubang Biopori dan Fasilitas Pemilahan Sampah.

Ketidaktahuan warga tentang fungsi dan manfaat biopori berdampak langsung pada pemanfaatan fasilitas tersebut. Hambatan dari sarana lubang biopori inilah yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memahami dan melanjutkan upaya pengelolaan biopori secara mandiri setelah program dilaksanakan. Meskipun secara konsep pemasangan lubang biopori terlihat sederhana dalam praktiknya tidak semua masyarakat memiliki kemampuan teknis, alat pendukung, atau kondisi tanah yang memungkinkan untuk menggali lubang dengan kedalaman tanah yang disarankan adalah 80–100 cm. Menurut Iswandi Umar, kedalaman ini penting untuk mengoptimalkan penyerapan air hujan, pengisian cadangan air tanah, dan dekomposisi sampah organik menjadi kompos (Umar, 2012). Proses penggalian menjadi tidak efektif ketika alat yang digunakan tidak sesuai dengan medan atau jika proses tersebut memerlukan tenaga yang besar, yang pada akhirnya membatasi inisiatif masyarakat.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan langsung dari hasil wawancara dengan Bapak Syahril 55 tahun yang merupakan salah satu masyarakat dari Kecamatan Padang Utara yaitu:

“....susah gali lubangnya karena cuma pakai linggis untuk lubangi tanah, belum lagi kalau di dalam tanahnya ada batu-batu. Jadi emang kemaren tu butuh 2 orang untuk gali lubangnya. Terus biopori yang dikasih waktu itu ada 10 lubang biopori perkecamatan, kebetulan di Kecamatan Padang Utara hanya kawasan ini yang di pasang itu aja ga sampai 1 rumah 1 biopori. Sebenarnya hambatannya itu di penggalian tanah saja yang alatnya kurang memadai untuk kondisi tanah tertentu jadi membutuhkan tenaga lebih tetapi ya namanya gotong royong ya jadi semuanya terasa lebih mudah harusnya cuma kan ini dalam kegiatan bersama jadi ya masyarakat sama-sama mau. Tapi beda lagi kalau sendiri-sendiri untuk buat ini kayanya bakal susah ada kesadaran pribadi” (Wawancara pada 2 Juli 2025).

Ungkapan dari Bapak Syahril (55 tahun) menunjukkan bahwa terdapat kesulitan yang masyarakat alami saat pemasangan lubang biopori di lingkungannya, karena setiap titik lubang biopori memiliki jenis dan struktur tanah yang berdeba-beda yang menimbulkan hambatan seperti, kesulitan melubangi tanah yang berbatu dengan alat sederhana seperti linggis tanah. Penggunaan alat yang masih manual membuat masyarakat menganggap bahwa alat tersebut kurang efisien digunakan. Masyarakat menginginkan adanya alat yang dapat meringankan kendala tersebut seperti penggunaan mesin bor, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Rajaly (68 tahun) yang merupakan salah satu masyarakat dari Kecamatan Padang Selatan mengungkapkan bahwa dalam penggalian lubang di perlukan adanya alat yang lebih memudahkan masyarakat, sebagai berikut:

“.....perlu alat yang lebih untuk menggali tanah untuk lubang biopori, karena kemaren orang yang gali lubangnya agak kesusahan karena cumapakai linggis gitu dan butuh 2 orang untuk menggali linggisnya. Selain itu, tanahnya pastiin dibasahin dulu biar gampang di lubangi dan jangan yang banyak batu. Sebenarnya pakai linggis bisa aja untuk gali lubangnya tapi lebih mudah kalau ada bor tanah yang pakai mesin...” (Wawancara Langsung 25 Juni 2025).

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Bustami (65 tahun) dan Ibu Desrianti (55 tahun), warga Kecamatan Padang Utara dan Koto Tengah, yang menyebutkan bahwa keterbatasan mesin bor membuat proses penggalian tanah untuk pembuatan lubang biopori menjadi sulit jika harus dilakukan secara mandiri. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya keberlanjutan pengelolaan lubang biopori. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana teknis menjadi hambatan penting yang menurunkan minat dan kemampuan warga untuk melanjutkan program biopori secara mandiri karena dianggap tidak efisien. Hambatan ini juga berpengaruh pada ketersediaan sarana pemilahan sampah, mengingat lubang biopori berfungsi sebagai wadah pembuangan sampah organik. Jika jumlah lubang biopori terbatas, maka fasilitas pemilahan sampah organik juga menjadi tidak memadai. Pemerintah memang telah menyediakan tempat sampah terpilah di ruang publik (Riska & Mubarak, 2025), namun fasilitas tersebut hanya tersedia di area umum. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk membuat lubang biopori di lingkungan rumahnya agar dapat memilah dan mengelola sampah organik secara lebih efektif.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Sari et al. (2023) yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Jandi Meriah menghadapi kendala besar dalam pengelolaan sampah di TPS akibat minimnya sarana dan prasarana, termasuk lahan TPS yang sempit, keterbatasan dana, serta belum terlaksananya rencana pembangunan dan perbaikan TPS. Upaya untuk menyediakan incinerator juga terhambat oleh kondisi tersebut. Selain itu, jumlah personel pengelola sampah yang hanya 10 orang membuat kinerja pengelolaan tidak optimal. Untuk mengatasi kekurangan tenaga, pemerintah desa membentuk Satgas Lingkungan guna membantu pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Tidak Adanya Pengelolaan Lanjutan Terhadap Sampah Organik.

Pengelolaan sampah organik merupakan bagian penting dalam penggunaan lubang biopori karena, lubang biopori tidak hanya berfungsi untuk resapan air, tetapi juga sebagai salah satu tempat pembuangan sampah organik yang ramah lingkungan sehingga, sampah organik tidak langsung dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang nantinya akan membantu pengurangan timbulan sampah di Kota Padang.

Masih banyak masyarakat yang belum memahami hubungan antara perilaku membuang sampah dan upaya menjaga kualitas lingkungan sekitarnya, sehingga pemanfaatan lubang biopori tidak dilakukan secara optimal. Dari beberapa pernyataan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemasangan lubang biopori, banyak masyarakat yang tidak mengelola sampah organik dengan lubang biopori. Seperti pernyataan dari Ibu Syifa 28 tahun selaku masyarakat dari Kecamatan Lubuk Begalung sebagai berikut:

“...penjelasan tentang penggunaan lubang bioporinya waktu itu kurang saya pahami jadi saya belum yakin fungsi sampah organik itu gimana jadi kalau untuk sampah organik saya gada masukin ke lubang biopori takut tersumbat. kalau untuk sampah saya tidak ada memilah, karena ribet dan saya langsung buang aja lalu kasih ke petugas LPS (Lembaga Pengelola Sampah). Saya juga takut bagaimana jika sedang banjir dan saya baru memasukan sampah organik kedalam sana, apa tidak tersumbat nantinya dan sampahnya tergenang” (Wawancara Pada 30 Juni 2025).

Dari pernyataan Ibu Syifa (28 tahun) dapat diketahui bahwa masyarakat tidak memasukan sampah organik kedalam lubang biopori dikarenakan kurangnya pemahaman akibat minimnya sosialisasi tentang pengelolaan lubang biopori, yang menganggap bahwa sampah organik dapat menyumbat lubang tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Yuni (40 tahun) masyarakat dari Kecamatan Nanggalo sebagai berikut:

“... kalau untuk sampah organik saya biasanya langsung buang aja gada di pilah-pilah dan dimasukan ke lubang biopori. dan untuk pengelolaan sampah organik disini belum dilakukan sosialisasi jadi memang biasanya masyarakat disini buang sampah ya langsung aja dimasukan ke kantong plastik lalu dikasih ke petugas LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah). Karena kita tidak hanya di rumah saja, jadi terkadang ga mau repot seperti buang sampah yang di satuin aja kedalam plastik selain itu juga karna kebiasaan.” (Wawancara Pada tanggal 16 Juni 2025).

Serupa dengan pernyataan di atas, pernyataan dari Bapak Tono (55 tahun), Joni (45 tahun), dan Ibu Reni (47 tahun) selaku masyarakat setempat mengatakan bahwa mereka jarang melakukan pemilahan sampah karena biasanya sampah rumah tangga langsung di buang saja kemudian nantinya akan di ambil

oleh petugas LPS selain itu, pemilahan sampah di anggap sedikit merepotkan karena harus di beda-bedakan tempat pembuangannya. Dapat diketahui bahwa masyarakat tidak memasukan sampah organik kedalam lubang biopori dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pemanfaatan sampah organik untuk lubang biopori selain itu perilaku masyarakat yang tidak memilah anatar sampah organik dan anorganik juga menyebabkan timbulan sampah di Kota Padang semakin meningkat. Timbulan sampah di Kota Padang telah mencapai sekitar 750 ton/perhari yang 65%-nya merupakan sampah organik sekitar 340 ton sampah per hari yang belum terolah (Mimbarsumbar, 2025).

Sikap masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dipengaruhi oleh cara pandang dan pemahaman mereka. Masyarakat yang berpikir positif akan menganggap kebersihan sebagai hal penting bagi kesehatan sehingga berusaha menjaga dan melindunginya. Sebaliknya, masyarakat dengan pandangan negatif menganggap kebersihan tidak penting, sehingga menjadi tidak peduli dan enggan menjaga lingkungan (Sari et al., 2023). Begitupun dengan masyarakat di Kota Padang yang masih enggan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik yang mana perilaku tersebut dapat membantu mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Masyarakat pada umumnya memiliki persepsi bahwa biopori hanya berfungsi sebagai lubang resapan air, bukan alat pengomposan. Pemahaman yang keliru ini disebabkan kurangnya informasi teknis dan visualisasi praktik langsung di lapangan. Tanpa contoh nyata, warga kesulitan memahami bagaimana biopori dapat membantu mengurangi volume sampah organik secara efektif.

Kurangnya inovasi dalam metode sosialisasi juga berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat untuk terlibat. Sosialisasi yang dilakukan secara konvensional melalui pertemuan warga sering kali tidak menarik perhatian masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kepedulian masyarakat cenderung meningkat hanya pada saat terjadi masalah lingkungan seperti banjir atau bau tidak sedap dari tumpukan sampah. Perhatian tersebut bersifat sementara dan tidak berlanjut menjadi kebiasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat masih bersifat situasional, bukan kesadaran yang terbentuk secara permanen.



Gambar 2. Sampah di depan rumah masyarakat

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Seperti halnya pada gambar di atas, terlihat bahwa masyarakat masih membuang sampah tanpa melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Botol plastik tercampur dengan sisa makanan, kemudian seluruh sampah tersebut diangkut oleh petugas LPS tanpa melalui proses pemilahan di tingkat rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membuang sampah organik ke TPS alih-alih memanfaatkannya melalui lubang biopori. Kebiasaan mencampur sampah organik dan non-organik mengindikasikan bahwa proses pemilahan belum menjadi praktik yang dilakukan oleh warga. Penelitian lain yang dilakukan oleh Widiyanti et al. (2024) yang menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dan ketersediaan fasilitas dengan perilaku pengelolaan sampah. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai serta fasilitas pendukung yang tersedia, praktik pengelolaan sampah cenderung meningkat. Hal ini juga berlaku pada pengelolaan lubang biopori. Pengetahuan mengenai manfaat lubang biopori, ketersediaan alat, serta kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan pemilahan sampah dan pemanfaatan lubang biopori secara berkelanjutan.

Tidak Adanya Monitoring atau Evaluasi Program.

Evaluasi dalam Program Padang Bagoro 1 Rumah 1 Biopori sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana tujuan dari pelaksanaan program terlaksanakan. Tanpa adanya evaluasi sebuah program tidak dapat diketahui apakah keterkaitan program dengan lingkungan program dapat di teruskan, ditunda, ditingkatkan, dikembangkan, di terima, atau di tolak. Evaluasi dalam suatu program pembangunan adalah alat ukur atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana sebuah program tersebut terlaksana sesuai tujuannya (Muryadi, 2017).

Dalam Program Padang Bagoro 1 Rumah 1 Biopori tidak ada dilakukannya evaluasi program, hal ini didukung oleh pernyataan dari salah satu Kepala Seksi Tantrib (Ketentraman dan Ketertiban) Kecamatan Padang Utara yaitu Bapak Harvi Dasnoer 32 tahun, mengatakan bahwa pihaknya tidak ada melakukan evaluasi setelah lubang biopori di pasang sebagai berikut:

“...kalau evaluasi dari kecamatan tidak ada, kami pun tidak mengamanatkan kepada RT/RW untuk melakukan evaluasi karena dari DLH nya sendiri tidak ada menuruh untuk evaluasi terhadap biopori tersebut. Jadi untuk pemanfaatan lubang biopori dikembalikan kepada masyarakat bagaimana penggunaannya, karena dari kami sudah melakukan pelaksanaan pemasangan lubang biopori dan melakukan sosialisasi pemasangan lubang biopori kepada masyarakat. lalu lubang ini dikembalikan kepada masyarakat untuk keberlanjutan programnya” (Wawancara Langsung 1 Juli 2025).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa memang tidak ada evaluasi dalam program ini, selain itu pernyataan dari bapak Arliswandi (58 tahun), Putra (29 tahun) dan Bapak Supra (42 tahun) selaku perangkat RT atau Camat di beberapa kecamatan setempat juga mengatakan bahwa setelah pemasangan lubang biopori tidak ada dilakukan evaluasi karena tidak ada arahan dari pihak DLH selaku dinas yang menaungi program ini. Hal ini didukung oleh pernyataan dari salah satu pegawai DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Padang yaitu Bapak Yopie Eka Putra 43 tahun selaku Sub-substansi Komunikasi Lingkungan DLH Kota Padang yaitu:

“kalau untuk program Padang Bagoro memang sudah habis di Desember tahun 2024, karena memang ini program tahunan, tetapi untuk keberlanjutan dimasa jabatan pak Fadly Amran sepertinya tetap berlanjut tetapi sekarang fokus dari pak Fadly Amran mengenai lingkungan lebih mengarah ke kondisi jalan, pengelolaan sampah termasuk mengenai LPS (Lembaga Pengelola Sampah) dan beberapa permasalahan banjir dan genangan yang diupayakan dengan pembuatan drainase pada area yang tergenang” (Wawancara Pada 19 Mei 2025).

Minimnya kolaborasi antar pihak juga berperan dalam tidak berjalannya pengelolaan Lubang biopori, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, dan kelompok masyarakat belum berjalan secara efektif. Tidak ada sistem pelaporan atau monitoring yang memastikan bahwa setiap rumah tangga benar-benar menerapkan praktik pemilahan akibatnya, inisiatif yang bersifat top-down tidak diikuti oleh dukungan bottom-up yang kuat dari masyarakat (Nurbaiti & Bambang, 2017). Tanpa adanya evaluasi yang sistematis dan terstruktur, tidak tersedia umpan balik untuk menilai sejauh mana masyarakat benar-benar memahami, memanfaatkan, dan merawat lubang biopori sesuai dengan tujuan awal program. Evaluasi seharusnya menjadi bagian integral dari siklus program agar pelaksana dapat mengidentifikasi kendala, menilai efektivitas pelaksanaan, serta melakukan perbaikan kebijakan atau pendekatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tidak adanya evaluasi juga menciptakan kesan bahwa tanggung jawab pengelolaan lubang biopori sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, tanpa pendampingan lanjutan dari pihak pemerintah. Hal ini berdampak pada menurunnya keterlibatan masyarakat, terutama dalam aspek pemanfaatan jangka panjang seperti pengisian rutin sampah organik, pemeliharaan lubang, dan pengambilan hasil kompos. Rendahnya partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan lemahnya mekanisme insentif dan sanksi dalam sistem pengelolaan sampah. Tidak ada penghargaan bagi warga yang aktif melakukan pengelolaan, dan tidak ada sanksi tegas bagi yang lalai. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki dorongan kuat untuk berubah.

Program lingkungan yang bersifat sukarela sering kali tidak berkelanjutan tanpa dukungan kebijakan yang mengikat. Kurangnya literasi lingkungan di kalangan masyarakat turut menjadi penyebab tidak berjalannya pengelolaan sampah organik. Sebagian besar warga tidak memahami dampak ekologis dari penumpukan sampah organik yang tidak terurai dengan baik. Padahal, sampah organik yang menumpuk dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Minimnya edukasi lingkungan menyebabkan masyarakat tidak melihat pengelolaan sampah sebagai tindakan penting. Selain itu, sistem pendidikan formal belum sepenuhnya memasukkan praktik pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari kurikulum lokal. Kesadaran lingkungan seharusnya dibentuk sejak usia dini agar menjadi bagian dari budaya hidup bersih. Tanpa pendidikan berkelanjutan, perilaku masyarakat cenderung tidak memiliki pemahaman mendasar mengenai keberlanjutan lingkungan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi upaya perubahan sosial jangka panjang.



Gambar 3. Lubang biopori yang isinya kosong

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa lubang biopori dibiarkan kosong tanpa diisi sampah organik sehingga tidak dapat menghasilkan kompos. Lubang yang tidak terisi juga berpotensi menampung air dan menimbulkan genangan. Pada gambar sebelah kiri tampak pula lubang biopori yang tidak memiliki tutup, sehingga memudahkan material asing seperti plastik masuk dan menyumbat lubang. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya pemeliharaan dan evaluasi terhadap keberlanjutan penggunaan lubang biopori di masyarakat. Tanpa evaluasi yang berkelanjutan, efektivitas program sulit diketahui, dan edukasi terkait pemanfaatan lubang biopori tidak tersampaikan dengan optimal. Akibatnya, program hanya berhenti pada tahap pemasangan tanpa adanya tindak lanjut berupa pengisian, pemeliharaan, atau pemanfaatan hasilnya. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami hubungan antara pengelolaan sampah organik melalui lubang biopori dan upaya pencegahan banjir yang menyebabkan potensi manfaat biopori tidak pernah dirasakan secara nyata oleh masyarakat (Widiyanti et al., 2024).

Dari sisi kebijakan, evaluasi terhadap program *Padang Bagoro* belum menunjukkan hasil signifikan dalam perubahan perilaku masyarakat. Meskipun kampanye “1 Rumah 1 Biopori” dilakukan tidak ada sistem monitoring yang memastikan keberlanjutan penggunaannya. Program cenderung berhenti pada tahap seremonial tanpa tindak lanjut yang konkret. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih berbasis partisipasi aktif. Berdasarkan temuan keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengelolaan sampah organik oleh masyarakat di Kota Padang bukan hanya akibat keterbatasan fasilitas, tetapi juga lemahnya aspek kesadaran, edukasi, dan evaluasi terhadap program. Program yang bersifat top-down tanpa keterlibatan aktif masyarakat cenderung gagal menciptakan perubahan perilaku jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta, pengelolaan sampah organik dapat dioptimalkan sebagai bagian dari solusi lingkungan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkan melalui pendekatan edukatif, kultural, dan insentif yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi warga (Riska & Mubarak, 2025). Hanya dengan cara ini, pengelolaan lubang resapan biopori di Kota Padang dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berhasil.

Pembahasan

Penelitian ini mengkaji rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lubang resapan biopori (LRB) di Kota Padang sebagai bentuk minimnya pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga. Berdasarkan teori partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff, keberhasilan program lingkungan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan pada seluruh tahapan partisipasi, yakni pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Keempat tahap ini berperan membentuk rasa memiliki, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan program (Hutagalung, 2022). Dalam konteks biopori, rendahnya keterlibatan masyarakat pada setiap tahap menunjukkan bahwa pengelolaan sampah organik melalui lubang biopori belum berfungsi sebagai kegiatan yang terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari masyarakat Kota Padang, berikut bagaimana keempat tahap partisipasi pengelolaan biopori yang terjadi di Kota Padang menurut Teori Partisipasi:

Pengambilan Keputusan/ Perencanaan

Program biopori di Kota Padang diawali melalui inisiatif Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan gerakan Padang Bagoro “1 Rumah 1 Biopori”. Implementasinya lebih bersifat administratif dan seremonial daripada partisipatif. Masyarakat hanya menerima instruksi pemasangan tanpa dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan teknis, atau diskusi mengenai tujuan ekologis program. Minimnya keterlibatan sejak awal membuat warga tidak memahami secara mendalam hubungan antara biopori, pengurangan sampah organik, dan pencegahan genangan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya fondasi partisipasi pada tahap perencanaan, sehingga program tidak tumbuh sebagai gerakan kolektif melainkan sekadar kegiatan proyek pemerintah (Nurbaiti & Bambang, 2017). Tidak adanya dialog partisipatif pada tahap perencanaan

berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi biopori. Sebagian masyarakat memandang lubang biopori hanya sebagai lubang resapan air tanpa memahami manfaatnya dalam mengurangi timbulan sampah organik dan menghasilkan kompos alami. Tanpa penjelasan yang memadai, biopori dianggap sebagai aktivitas sekali pasang yang tidak perlu dirawat. Hal ini selaras dengan pandangan Cohen dan Uphoff bahwa program yang tidak melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan cenderung tidak berkelanjutan karena warga tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungannya (Hutagalung, 2022).

Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat juga masih sangat terbatas. Keterbatasan pengetahuan teknis, minimnya alat seperti bor tanah, kondisi tanah yang keras, serta absennya pendampingan teknis dari pemerintah menyebabkan masyarakat tidak mampu mengelola biopori secara mandiri. Banyak lubang biopori ditemukan dalam kondisi rusak, tertimbun, atau tidak pernah diisi sampah organik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tahap pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh dukungan struktural, sebagaimana dijelaskan Cohen dan Uphoff, bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat apabila pemerintah menyediakan sarana, pelatihan, dan pendampingan yang memadai (Nurbaiti & Bambang, 2017). Tahap pemanfaatan hasil juga menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat. Sebagian besar warga tidak memahami bahwa biopori menghasilkan kompos alami yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian rumah tangga atau penghijauan lingkungan. Minimnya pembelajaran sosial membuat masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari kegiatan ini, sehingga tidak termotivasi untuk melanjutkan pengisian sampah organik ke dalam lubang. Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa partisipasi akan meningkat apabila masyarakat melihat nilai guna dari suatu program (Rahmanita, 2020). Realitasnya di Kota Padang, manfaat biopori belum dirasakan secara nyata karena tidak ada pendampingan dalam pemanfaatan kompos dan tidak ada mekanisme hasil yang terlihat jelas bagi warga.

Pemanfaatan Hasil

Upaya pengelolaan sampah organik akan lebih efektif jika disertai dengan pemberdayaan komunitas lokal. Pembentukan kelompok pengelola lingkungan di tingkat RT atau RW dapat menjadi langkah awal untuk membangun tanggung jawab kolektif. Ketika masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan, rasa memiliki terhadap program akan meningkat. Peran tokoh masyarakat juga sangat penting dalam mendorong perubahan perilaku kolektif. Tokoh agama, adat, maupun pemuda memiliki pengaruh sosial yang kuat di lingkungan setempat. Melalui pendekatan personal dan kultural, pesan tentang pentingnya pengelolaan sampah organik dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain aspek sosial, dukungan finansial juga dibutuhkan untuk keberlanjutan program. Banyak masyarakat yang enggan terlibat karena merasa terbebani biaya tambahan dalam pembuatan biopori atau alat pengomposan. Oleh karena itu, pemerintah dapat menyediakan bantuan material awal sebagai bentuk stimulus partisipasi warga. Penerapan sistem penghargaan bagi lingkungan yang berhasil mengelola sampah organik dapat menjadi strategi motivasional. Kompetisi antar-kelurahan dengan indikator kebersihan dan keberhasilan program biopori dapat menumbuhkan semangat partisipatif. Pendekatan kompetitif seperti ini telah terbukti efektif di beberapa daerah lain dalam meningkatkan kesadaran lingkungan (Evanggelion et al. (2025). Ketiadaan praktik pemanfaatan hasil menyebabkan fungsi ekologis biopori tidak berjalan optimal. Lubang yang tidak pernah diisi kehilangan peran sebagai media resapan air maupun sebagai sistem pengomposan rumah tangga. Selain itu, kebiasaan warga yang masih membuang sampah secara campur tanpa pemilahan memperparah kondisi. Tanpa perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, lubang biopori tidak dapat menjadi solusi pengurangan sampah organik. Konteks ini memperlihatkan bahwa program belum berhasil menanamkan perilaku baru, dan partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat kesadaran pasif, bukan kesadaran aktif yang berdampak pada tindakan.

Evaluasi

Tahap evaluasi juga belum berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ditemukan adanya mekanisme monitoring berkala antara RT, kelurahan, dan DLH untuk menilai kondisi lubang biopori atau mengevaluasi kendala teknis yang muncul. Ketiadaan evaluasi partisipatif membuat masyarakat tidak memiliki wadah untuk berbagi pengalaman atau hambatan. Menurut Cohen dan Uphoff, tahap evaluasi merupakan komponen penting dalam siklus partisipasi karena menjadi ruang refleksi bersama untuk memperbaiki praktik di lapangan. Tanpa evaluasi, program berhenti pada aktivitas pemasangan fisik tanpa ada proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Akibatnya masyarakat semakin tidak memahami dampak dari tindakan mereka (Dzajuli, 2024).

Rendahnya partisipasi masyarakat pada semua tahapan mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan biopori di Kota Padang masih berorientasi pada pendekatan proyek, bukan pemberdayaan. Program tidak berkembang menjadi gerakan kolektif karena tidak melibatkan

masyarakat sebagai mitra. Cohen dan Uphoff menegaskan bahwa partisipasi sejati harus melibatkan masyarakat secara aktif, terstruktur, dan berkelanjutan, tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, peningkatan kapasitas teknis, mekanisme monitoring, dan pembelajaran sosial, program biopori tidak akan mampu mencapai tujuan ekologisnya (Hutagalung, 2022). Oleh karena itu, reorientasi kebijakan ke arah pendekatan partisipatif dan komunitas menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sampah organik di Kota Padang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lubang resapan biopori di Kota Padang disebabkan oleh minimnya keterlibatan masyarakat pada seluruh tahapan partisipasi, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini meliputi sosialisasi yang bersifat *top-down*, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan teknis masyarakat, kurangnya dukungan fasilitas dari pemerintah, serta absennya mekanisme evaluasi partisipatif. Akibatnya, pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga belum berjalan efektif dan program biopori belum berkelanjutan. Temuan ini memperkuat pandangan Cohen dan Uphoff bahwa partisipasi masyarakat yang autentik dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program lingkungan berbasis komunitas. Pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan strategi pemberdayaan masyarakat dengan mengubah pendekatan program biopori dari proyek administratif menjadi gerakan partisipatif. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi interaktif, pelatihan teknis, pendampingan lapangan, pembentukan kelompok kerja lingkungan di tingkat RT, serta mekanisme evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah organik dapat meningkat, sehingga keberlanjutan program biopori dan pengelolaan sampah organik di Kota Padang dapat tercapai secara efektif.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Alim, M. F. (2019). Sosialisasi pada Masyarakat. Pusat Manajemen Pengetahuan Fakultas Teknologi Pertanian UGM. <https://kmc.tp.ugm.ac.id/kms/sosialisasi-pada-masyarakat/>
- Anggitirani, R. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat Desa dan Pengurus Bumdes Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Objek Wisata Pagubugan Melung (Studi di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas). Universitas Muhammadiyah Purwoket]. <https://repository.ump.ac.id/14651/>
- Arifin, I. (1996). *Penelitian Kualitatif dalam ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press.
- Aswasulasikin. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pendidikan (Kajian Fenomenologi di Sekolah Dasar). [https://eprints.hamzanwadi.ac.id/13/1/Partisipasi Masyarakat.pdf](https://eprints.hamzanwadi.ac.id/13/1/Partisipasi%20Masyarakat.pdf)
- Defitri, M. (2023). Solusi Atas Sampah Organik, Kenali Lubang Biopori. Waste4change. <https://waste4change.com/blog/solusi-atasi-sampah-organik-kenali-lubang-biopori/>
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. (2024). Pedoman Teknis Padang Bagoro 2024. <https://dlh.padang.go.id/pedoman-teknis-padang-bagoro>
- Diskominfo. (2024). Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama warga Kota Padang kembali melakukan aksi Padang Bagoro edisi November 2024. <https://www.instagram.com/>
- Dzajuli, R. A. (2024). Evaluasi Program pemberdayaan masyarakat. In B. Febrianto (Ed.), *Ilmiah Kesehatan* (Vol. 2, Issue 1). UMG Press. [http://eprints.umg.ac.id/11322/1/Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat %2B Cover - UMG Press 2024.pdf](http://eprints.umg.ac.id/11322/1/Evaluasi%20Program%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20Cover%20-%20UMG%20Press%202024.pdf)
- Evangelion, E., Maryanti, D., Raysharie, P. I., Limbong, Y., Mahar, V. K. S., Astria, S. K., Delonio, E., Gunawan, T. N., & Khomariah, S. N. (2025). Penerapan Lubang Resapan Biopori sebagai Edukasi Pengelolaan Sampah Organik bagi Masyarakat Desa Gohong. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(4), 4904–4911.
- Evania, N. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Program Magelang Cinta Organik dengan Teknologi Biokonversi (Larva Black Soldier Fly) Studi Kasus di Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Universitas Tidar. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14745&keywords=
- Hidayatullahi, R. (2024). Kajian Kinerja Pengelolaan Bank Sampah Induk Panca Daya Kota Padang Berdasarkan Permenlhk No. 14 Tahun 2021. Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/477390/>
- Hutabarat, I. V., & Simanjuntak, L. E. (2022). Using Bio-Pore Infiltration Hole to Reduce Flooding in Densely Population Communities of Jakarta and Surrounding Area. *IOSR Journal of Engineering*, 12(8).

-
- Hutagalung, S. S. (2022). *Buku Ajar Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik* (1st ed.). Malang: Literasi Nusantara.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Data Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2013). Lubang Resapan Biopori: Teknologi Tepat Guna Mengatasi Banjir, Sampah, dan Ketersediaan Air Tanah. Kementerian Lingkungan Hidup. http://perpustakaan.menvh.go.id/pustaka/images/docs/Lubang_Resapan_Biopori.pdf
- Kuncara, J., Jamilatun, S., Febriani, A. V., Idris, M., & Setyawan, M. (2024). Potensi dan Tantangan Pemanfaatan Refuse Derived Fuel dalam Co-Firing PLTU di Indonesia: A Review. Seminar Nasional Inovasi Dan Teknologi (SEMNASINTEK).
- Miles A., M. and H. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. New York: Sage.
- Mimbarsumbar. (2025, June 13). Kelola Sampah Kota Padang, Wako Fadly Amran Jajaki Kerjasama Dengan PT Awina Sinergi International. *Mimbarsumbar.Id*. <https://mimbarsumbar.id/kelola-sampah-kota-padang-wako-fadly-amran-jajaki-kerjasama-dengan-pt-awina-sinergi-international/>
- Muryadi, A. D. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran)*, 3(1).
- Nurbaiti, S. & Bambang, A. . (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 224.
- Rahmanita Fauzia D., B. I. and A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Kota Surabaya). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 23(2), 51. <https://doi.org/10.30649/aamama.v23i2.137>
- Ril, R. (2024). *Padang Bagoro 2024*, Hendri Septa : Budaya Bersih Dimulai dari Keluarga. <https://sumbar.antaraneews.com/berita/597759/padang-bagoro-2024-hendri-septa--budaya-bersih-dimulai-dari-keluarga>
- Riska, M., & Mubarak, A. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pemilahan Sampah di Kecamatan Padang Selatan). *YASIN*, 5(4), 4007–4025. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i4.6441>
- Safitri, N., Myrna, R., & Ismanto, S. U. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Negara (JANE)*, 14(1), 304. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41314>
- Sari, C. N., Al-illahiyah, L. H., Kaban, L. B., Hasibuan, R., Nasution, R. H., & Sari, W. F. (2023). Keterbatasan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Dan Tantangan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Desa Jandi Meriah Kec . Tiganderket Kab . Karo). *Human And Education*, 3(2), 268–276.
- Sari, N. (2024). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(4), 879–892. <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i4.15729>
- Subroto, H., Fadel, M., Maliki, H., Mulyani, W., D. E., & Rifa. (2024). Pemanfaatan Lubang Biopori Sebagai Resapan Air Hujan dan Kompos Alami di Wilayah Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka. *Aksi Nyata Fol*, 1(4).
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). In *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tijani, H., Aulia, N., Pamungkas, H., Saputri, L., & Nazar, R. F. (2024). Implementasi Lubang Resapan Biopori sebagai Strategi Pemberdayaan Berkelanjutan dan Pelestarian Lingkungan di Desa Cihanyir. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 5(3), 1–20.
- Umar, I. (2012). *Ekologi dan Ilmu Lingkungan* (Tim Editor UNP Press (ed.); 1st ed.). UNP Press Padang.
- Widiyanti, T., Herdiansyah, D., Ernyasih, E., & Fauziah, M. (2024). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat. *Environmental Occupational Health And Safety Journal*, 5(1), 53–60.
- Widyastuti, A. E. S. (2025). Pentingnya collaborative governance dalam pengelolaan sampah: studi kasus mekanisme pengelolaan sampah berbasis zero waste di TPS Go-Sari dan TPA BLE Banyumas. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3163–3176.
-